

SCHOOL CULTURE-MANAGEMENT AND SPATIAL THEORY

Mukhlisah, AM. M.Pd.¹

Abstrak

Artikel ini merupakan refleksi diri dari proses pemberlakuan budaya organisasi di lembaga pendidikan. Budaya organisasi dan pendidikan, diideomankan menjadi budaya sekolah. Sebuah budaya yang didasari pada nilai-nilai keyakinan, histori, dan ideologi lembaga pendidikan. Namun, permasalahannya, budaya sekolah dimaknai sebagai proses yang sempit. Yaitu, mencipta kebudayaan yang dapat membedakan satu lembaga yang satu dengan lainnya. Belum ada pembahasan tentang proses konstruksionis dan pembudayaan secara sustainable yang dibahas. Oleh karenanya, artikel ini, akan menghadirkan budaya sekolah sebagai 'kata kerja' yang bermakna "how it becoming culture and on active-process". Artinya, budaya organisasi sebagai nilai yang terus ditekankan dan diperkenalkan kepada elemen sekolah. Penulis akan mengkajinya dengan metode spatial teori- sebuah teori tentang tempat, teritori, dan waktu'.Intinya, artikel ini, adalah tawaran untuk memberlakukan budaya organisasi di lembaga pendidikan berbasis teori sosial dan manajemen.

Keyword ;School Culture dan Spatial Theory

PENDAHULUAN

Para ahli manajemen pendidikan, umumnya, mengkaji budaya sekolah menggunakan perspektif budaya organisasi yang ada di Ilmu Manajem secara umum. Budaya organisasi memang merupakan bagian terpenting lain setelah fungsi manajerialisme,

kepemimpinan, dan perilaku organisasi. Budaya organisasi adalah proses konstruksionis seorang pemimpin organisasi untuk 'menyamakan' dan 'menyeragamkan' nilai, aturan, cita-cita dan misi organisasi. Budaya organisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Tim Scott, adalah *sets of values* (kesatuan nilai) yang berasal dari komitmen, aturan, mitos, dan simbol-simbol organisasi.² Keberadaan budaya organisasi bisa saja berfungsi sebagai daya pembeda antara satu organisasi dari organisasi lainnya.

Wirawan mencontohkan dua model budaya organisasi yang berbeda dalam proses internalisasi dan eksternalisasi-objektif (penampakan sebagai objek yang bisa diobservasi). Dua model budaya organisasi tersebut adalah organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pondok Pesantren. Penampilan para anggota organisasi TNI; berbadan tegap, rambut cepak, dan berperilaku militer formal. Adapun penampilan para santri pondok pesantren, bentuk rambut dan tubuh beragam, perilaku yang informal, menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman.³ Perbedaan dua organisasi ini juga bisa dilihat dari cara berpakaian (*dress code model*), cara menghormati, bangunan kantor, dan aktivitas keseharian.

Dalam konteks pendidikan, budaya organisasi memang jarang dijadikan *grand theme* pembahasan untuk menciptakan *distinguished term* antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Lembaga pendidikan 'hampir' secara keseluruhan memiliki paradigma kebudayaan yang sama, seragam yang sama, dan penampilan fasilitas yang sama pula, khususnya sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Penampilan tampak berbeda di lembaga-lembaga swasta. Oleh karena, Rhenald Kasali, secara sederhana, membagi budaya organisasi lembaga pendidikan pada dua model; birokratis dan korporat. Lembaga pendidikan birokratis

² Tim Scott, at.all. *Healthcare Performance and Organisational Culture* (UK: Radecliffe Press, 1992), 45.

³ Wirawan, *Budaya dan Iklim Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 41.

sangat proseduralisme, dan miskin inovasi. Adapun yang berbudaya korporat; lembaga pendidikan ini lebih produktif, inovatif, adaptif, dan mendahulukan substansi dibanding prosedur.⁴

Tulisan ini tidak bermaksud menghadirkan budaya organisasi sebagai sebuah keharusan untuk dikaji. Namun, tulisan ini ada untuk menjelaskan betapa pentingnya mencari nilai-nilai budaya organisasi lembaga pendidikan. Pasalnya, lembaga pendidikan, sebagaimana dijelaskan Hasan Langgulung, adalah sebuah institusi yang di dalamnya mengandung ideologi, aturan nilai, visi, dan tujuan.⁵ Lembaga pendidikan tidak selalu berfungsi sebagai alat transfer ilmu pengetahuan semata, melainkan juga proses konstruksionis pembentukan karakter peserta didik. Oleh karenanya, pertanyaan besarnya adalah, bagaimanakah nilai-nilai dan aturan ini bisa membudaya? Bagaimanakah lembaga pendidikan juga menjadi bangunan utuh sebagai *worldview* peserta didik?

Ada satu pertanyaan lagi, yang menurut penulis urgensitasnya melebihi internalisasi budaya-budaya yang terkandung dalam lembaga pendidikan. Yakni, kapan dan dimana pembudayaan itu bisa diproduksi dan diimplementasikan? Pertanyaan ini oleh para sosiolog pendidikan seringkali dijawab berdasarkan *spatial theory of education*. Secara sederhana, teori ini berargumentasi bahwa *space* merupakan sebuah proses yang dikonsepsi, dikonstruksi, dan dipresentasikan kepada kehidupan manusia. *Space* (tempat, waktu, dan teritori tertentu), bukanlah hal yang kosong tidak memiliki makna. *Space* selalu berkaitan dengan interaksionisme perilaku manusia yang satu dengan lainnya. Dalam konteks pendidikan, berdasar pada pandangan ini, pendidikan merupakan sistem yang dibentuk, *space* pendidikan merupakan

⁴ Rhenald Kasali *Change* (Bandung: Rajawali Press, 2006), 345.

⁵ Sebagaimana dijelaskan oleh Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana, 2012), 20.

sebuah produk, *space* pendidikan adalah hasil proses pemroduksian, *space* pendidikan merupakan hasil konsepsi geometris antara kekuasaan dan interaksi subjektif, dan *space* pendidikan adalah outcome dari interaksi dialektis.

Dengan mengkombinasikan cara pandang teoritik ini, maka seorang pimpinan atau policy maker di dunia pendidikan akan menemukan, dan mengetahui cara mengimplementasikan budaya organisasi pada *space-space* dan teritori tertentu. Secara sederhana, menurut penulis, budaya organisasi di lembaga pendidikan biasanya dikaitkan pada aspek-aspek yang umum, seperti penyeragaman peserta didik, perilaku guru, dan aturan-aturan nilai lainnya. Padahal, interaksi mereka tidak hanya berada pada teritori dan lokalitas dibatasi. Mereka masih mengenali nilai-nilai kebudayaan lain di luar *space* lembaga pendidikan yang dibentuk. Berbeda jika pengimplementasian budaya ini didasarkan pada konsep *space of education theory* ini.

KONSEP BUDAYA SEKOLAH

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, kajian tentang budaya sekolah tidak pernah terlepas dari kajian budaya organisasi secara umum dalam ilmu manajemen. O'Neil mengatakan bahwa budaya organisasi menjadi bagian dari *educational administration studies* pasca menyebarnya literatur dan kajian tentang budaya organisasi. O'Neil mengatakan :

“The increased use of such cultural descriptors in the literature of educational management is significant because it reflects a need for educational organizations to be able to articulate deeply held and shared values in more tangible ways and therefore respond more effectively to new, uncertain and potentially threatening demands on their capabilities. Organizations, therefore, articulate values in order to provide

form and meaning for the activities of organizational members in the absence of visible and certain organizational structures and relationships. In this sense the analysis and influence of organizational culture become essential management tools in the pursuit of increased organizational growth and effectiveness".⁶

Oleh karenanya, sebelum mendefinisikan budaya sekolah, ada baiknya memahami dulu budaya organisasi. Talizuhu Ndraha menyebutkan budaya organisasi merupakan suatu kekuatan yang tidak terlihat tetapi dapat memengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang-orang yang bekerja dalam satu organisasi. Budaya organisasi ini dapat tampil lewat tradisi-tradisi, metode tindakannya sendiri yang secara keseluruhan menciptakan suatu iklim.⁷ Andrew Brown (dalam Wirawan) mengatakan bahwa budaya organisasi adalah : "...pattern of beliefs, values, and learned ways of coping with experience that have developed during the course of an organization's history, and which tend to be manifested in its material arrangements and in the behaviours of its members." Maknanya, (budaya organisasi) adalah polarisasi keyakinan, nilai-nilai, dan cara yang dipelajari menghadapi pengalaman yang telah dikembangkan sepanjang sejarah yang berupa manifestasi material dan perilaku anggota organisasi.

Pada bagian lain, Ahmad Sudrajat berdasarkan pendapat Edgar Schein, mengetengahkan sepuluh karakteristik budaya organisasi, meliputi: 1) *observe behavior: language, customs, traditions*; 2) *groups norms: standards and values*; 3) *espoused values: published, publicly announced values*; 4) *formal philosophy: mission*; 5) *rules of the game: rules to all in organization*; 6) *climate: climate of group in interaction*; 7) *embedded skills*; 8) *habits of thinking, acting, paradigms: shared knowledge for*

⁶ Dalam Cary L. Cooper at.al, *Organization Culture and Climate* (England: Wiley, 2001), 66.

⁷ Talizuhu Ndraha, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 33

⁸ Sebagaimana dikutip dalam William Mulford at.al, *Educational Leadership for Organisational Learning and Improved Student Outcomes* (New York: Kluwer Academic Publishers, 2004), 76.

socialization; 9) *shared meanings of the group*; dan 10) *metaphors or symbols*.⁹ Tidak hanya Sudrajat yang mengatakan ada sepuluh elemen budaya organisasi, Dharma pun mengatakan ada sepuluh hal yang berkaitan dengan budaya organisasi. 1) *Identitas* anggota, 2) penekanan kelompok, 3) Fokus orang, 4) penyatuan unit, 5) pengendalian, 6) toleransi resiko, 7) kriteria ganjaran, 8) toleransi konflik, 9) orientasi sarana tujuan, 10) fokus pada sistem terbuka.¹⁰

Aan Komariah dan Cepi Triatna mengatakan bahwa budaya sekolah adalah nilai-nilai mempengaruhi persepsi, pandangan dan cara kerja orang di dunia pendidikan. Apakah seorang karyawan menunjukkan kegairahan, disiplin, rasa suka atau -moral yang negatif seperti malas, kurang *responsive*, apatis, dan sebagainya. Demikian pula sebaliknya bahwa perbedaan-perbedaan *cultural* yang memiliki dampak besar terhadap kinerja organisasi dan kualitas pengalaman kerja yang dialami oleh para anggota organisasi.¹¹ Menurut Buchari Alma dkk, salah satu cara pengembangan pendidikan yang berkaitan erat dengan budaya organisasi adalah pengembangan kualitas layanan jasa pendidikan, *competitiveness-strength* (kekuatan daya saing), dan otonomi pendidikan.¹²

Wirawan mengatakan bahwa ada beberapa kata kunci yang menjadi elemen terpenting budaya organisasi. Berikut penulis gambarkan isi budaya organisasi;¹³

⁹Ahmad Sudrajat, budayaorganisasisekolah.blogspot.com. diakses tanggal 22 Maret 2014. Jam 20.30 WIB

¹⁰Dharma, Surya dan Haedar Akib. (2004). *Budaya organisasi kreatif: mencermati budaya organisasi sebagai faktor determinan kreativitas*. Dalam Jurnal Usahawan, Vol. 33 (03) Maret: 22-28.

¹¹ Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leadership*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 97

¹² Buchori Alma dkk, *Manajemen Corporate dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Fokus Pada Mutu dan Layanan Prima*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 48

¹³Wirawan, *Budaya dan Iklim Organisasi*, 42.

Isi Budaya Organisasi	
Artefak	Kode Etik
Simbol-Simbol Lembaga	Dress Code
Seni/Arsitek bangunan	Pahlawan
Kepercayaan	Sejarah
Filsafat organisasi	Ritual/upacara
Norma	Sumpah/Janji
Nilai-nilai	Cara berkomunikasi
Pola perilaku	Cara menghormat
Cara melakukan sesuatu	Tekhnologi
Adat Istiadat	Struktur organisasi
Kebiasaan	Struktur organisasi dan birokrasi
Harapan	Pola hubungan
Etos kerja	

Idealnya, seluruh komponen ini harus ada dan menjadi bagian organisasi. Tujuannya, agar suatu organisasi mampu menghadapi seluruh persoalan organisasi dengan nilai-nilai yang mereka miliki anut dan pegang teguh.

Selain persoalan di atas, adapula faktor-faktor yang dapat mempengaruhi budaya organisasi. *Pertama*, anggota organisasi, seperti pendiri organisasi, pimpinan organisasi, dan stakeholder. *Kedua*, budaya masyarakat. contoh, ideologi, pemerintah, dan gobalisasi. *Ketiga*, asosiasi profetik. Misalnya, kode etik dan standard profesi. *Keempat*, orientasi bisnis organisasi, seperti, pesaing, produk, dan pelanggan.¹⁴ Jika kerangka konseptual ini digerakkan pada roda organisasi pendidikan, maka ada lembaga pendidikan harus memiliki elemen budaya organisasi di atas, dan mencari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

¹⁴*Ibid.*, 72.

perilaku organisasi anggotanya. Semisal, dalam konteks pendidikan pesantren, sosok KH. Hasyim Asy'ari akan menjadi sumber budaya bagi setiap masyarakat Islam Tradisional. Beliau juga *role model* seorang pendiri dan pemimpin pesantren. Beliau memiliki nilai historisitas tinggi di kalangan pesantren. Dengan demikian, sebagai sebuah catatan, seorang pemimpin pesantren dilarang memiliki *split personality* yang jauh dari yang diciterakan terhadap sosok KH. Hasyim Asy'ari.

Dalam konteks kelembagaan pendidikan di Indonesia saat ini, kecenderungan pimpinan lembaga pendidikan memikirkan budaya organisasinya sangat jarang. Sistem budaya organisasi lembaga pendidikan selalu diberlakukan secara normatif. Seperti mengaca pada undang-undang, peraturan pemerintah, dan konsesi bersama antar anggota organisasi. Tidak banyak sekolah atau lembaga pendidikan memiliki ideologi-kebudayaan sendiri, yang digali berdasarkan historisitas, desain kelembagaan, norma, artefak dan lain sebagainya (lihat elemen budaya di atas). Kalaupun ada, lembaga pendidikan tersebut lebih banyak berasal dari pemikiran tentang orientasi bisnis kelembagaan semata, bukan pada proses pembudayaan.

Realitas ini menempatkan lembaga pendidikan kehilangan nilai sakralitas sebagai lembaga yang menyiapkan generasi masa depan. Orientasi kebudayaan yang ditanamkan di lembaga pendidikan tak ubahnya untuk menanggapi isu persaingan antar lembaga. Padahal, menurut Clive Dimmock, *et al*, meskipun manajerialisme dan isu global lainnya, yang berasal dari ilmu manajemen dan bisnis, ada *stance* yang wajib dimiliki oleh lembaga pendidikan. Dia mengatakan;

“education is a social service is undeniable. It is arguable, however, whether market models and concepts from the business world should be imported into this social service as principles on which to organize and lead. Markets,

choice, performance league tables, competition between schools and public relations – all tend to reconfigure notions of leadership and policy. There is evidence of loss in transposing business management and leadership to education.”¹⁵

Berdasarkan ini, betapapun, kepentingan pendidikan adalah pengembangan dan pendidikan masyarakat. Urusan bisnis dan upaya lainnya, hanya menjadi *suplement-completetion* pendidikan. Selain persoalan persaingan bisnis, budaya organisasi lembaga pendidikan Indonesia juga tercemari oleh perilaku negatif dan amoral. Penulis akan ulas problem budaya lembaga pendidikan Indonesia pada pembahasan berikutnya.

Jadi, pada kesimpulannya, budaya organisasi – yang kemudian berubah terminologinya menjadi budaya sekolah, adalah sebuah diskursus tentang kebudayaan (persepsi dan kreasi manusia tentang nilai) yang harus ada, dianut, dan diimplementasikan dalam lembaga pendidikan. Semisal, penyeragaman perilaku peserta didik, staff, dan masyarakat sekolah, berdasarkan pada nilai-nilai budaya keagamaan atau ketimuran.

PROBLEM LEMBAGA PENDIDIKAN; Refleksi Aspek Budaya

1. Masalah lingkungan yang tidak kondusif

Globalisalisasi dan implikasinya dalam dunia pendidikan sebagaimana telah dijelaskan diatas, jelas berpengaruh (langsung atau tidak langsung) pada lingkungan sekolah (secara khusus) sebagai bagian dari sistem sosial. Kegiatan dan aktivitas yang melingkupi sekolah sebagai ekse globalisasi telah menggeser lingkungan sekolah menjadi tidak kondusif lagi untuk iklim pembelajaran. Dari aspek pemikiran, pendidikan dalam hal ini

¹⁵ Clive Dimmock *Educational Leadership* 14

sekolah atau kampus tidak lagi dianggap tempat mencari ilmu atau kegiatan akademik-ilmiah, akan tetapi dianggap sebagai tempat kaum muda pembelajar merayakan status kelasnya. Atau pendidikan dalam pikiran mereka sudah tidak bisa memberikan solusi atas masalah keseharian mereka, hal ini juga dipertegas oleh tayangan-tayangan media elektronik berupa tayangan sinetron yang jauh berbeda dengan latar belakang mayoritas masyarakat dalam hal kesuksesan hidup dengan tahapan pendidikan yang dilalui atau dalam hal ketidak-suksesan karena tingkat pendidikan yang diselesaikan.

Dari aspek personal misalnya seorang guru yang seharusnya "*digugu dan ditiru*" harus mengorbankan idealismenya sebagai guru dengan menjadi tukang ojek atau pengumpul barang bekas hanya karena persolaan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup akibat gaji atau honorinya yang hanya cukup dibelikan sabun dan odol. Akibatnya guru tidak lagi bersemangat dalam proses pembelajaran karena mereka tidak siap atau tidak mempunyai tambahan *stock of knowledge*. Dari aspek perencanaan, proses pembelajaran yang dilakukan seringkali monoton dan membosankan, karena materi atau media pembelajaran yang ada tidak bisa memberi makna (*meaningfull learning*) pada pembelajar. Hal ini terjadi karena pembelajaran yang dilakukan hanya berorientasi "*lulus UAN*" atau karena guru yang bersangkutan tidak menguasai model-model pembelajaran yang variatif dan inovatif.

Dari aspek moralitas hukum, sering didapati penyelesaian masalah yang selingkuh, mendua dan tebang pilih, baik dalam ranah sekolah ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara umum. Dalam ranah sekolah, sering terjadi hasil akhir dalam perekrutan tenaga pengajar atau pembelajar sangat sarat dengan kolusi dan nepotisme. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, budaya

KKN yang melibatkan elite-elite bangsa bahkan para penegak hukumnya sendiri ikut terlibat, turut terseret menjadi pelaku dan tersangka. Keadaan ini adalah kondisi yang sangat tidak kondusif untuk iklim pembelajaran dalam dunia pendidikan.

Dari aspek kebijakan, dalam lingkungan pendidikan kita, kebijakan pemerintah tentang standar kelulusan secara nasional hanya dibebankan pada aspek kognitif pencapaian skor dalam beberapa bidang studi yang di-UAN-kan saja (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA), sehingga bidang studi lain yang bukan materi UAN yang notabene sangat penting dalam memberikan pembelajaran nilai-nilai moral-spiritual seperti bidang studi pendidikan agama terabaikan, baik dari sisi kognitif, afektif dan psikomotoriknya.

2. Masalah mentalitas / moralitas yang masih rendah.

Problem Kepercayaan diri. Harian Republika pernah melakukan investigasi dengan mewawancarai artis penyanyi dari Indonesia, Nafa Urbach dan penyanyi Pop terkenal Malaysia, Siti Nurhalizah. Pertanyaan sama diajukan kepada keduanya seputar keinginannya untuk menjadi terkenal seperti Brithney Spears, artis top yang disebut-sebut sebagai *diva*-nya musik pop Amerika saat ini. Jawaban Nafa dan Siti ternyata berbeda. Nafa begitu antusias menjadikan dirinya seperti Spears, baik gayanya yang sensual, lirik, maupun kualitas *performancenya*. Sebaliknya Siti justru ingin menjadi diri sendiri. Degan dalih bahwa budaya Malaysia tidak bisa begitu saja “mengimpor” budaya Barat yang arogan, seksual, dan penuh luxiorisme.

Yang menjadi persoalan bukan pada jawaban Siti yang seakan-akan alergi terhadap modernisasi barat (*westernized*) dan lebih memilih sesuatu yang bersifat tradisional-konvensional. Sebaliknya juga bukan pada jawaban Nafa untuk mengadaptasi dirinya untuk bergaya seperti Spears dan berfikir lebih modernis. Namun persoalannya justru terletak pada

kepercayaan diri untuk mengapresiasi secara positif terhadap kemampuan diri sendiri. Nafa seolah-olah kurang percaya diri akan budaya dan tradisi bangsa sendiri untuk disandingkan dengan budaya global di dunia maju.

Ini menunjukkan adanya salah satu indikasi sederhana betapa pendidikan di Indonesia telah menjadikan anak bangsa tidak memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan, budaya, dan tradisi sendiri. Sikap tidak percaya diri di atas kiranya merupakan implikasi dari adanya penanganan pendidikan di Indonesia oleh pemerintah, sebagai unsur “pinggiran” dan bukan prioritas dari seluruh orientasi sistem pembangunan nasional. Sehingga implikasi pada pengelolaan atau sistem managerial pendidikan yang tidak profesional, dilaksanakan secara amatiran, berdasarkan *common sense*, spekulasi, miskonsepsi. Ini bisa dilihat dari rangkaian inovasi, perubahan sistem, diujicobakan pelbagai kurikulum dan orientasi, seluruhnya belum kelihatan pernah dilakukan evaluasi secara mendalam.¹⁶

Budaya tidak percaya diri juga lahir karena sistem pendidikan yang ada selama ini belum mengacu pada usaha untuk membebaskan rakyat dari ketertindasan struktur dan birokrasi. Kecerdasan, kemahiran, dan keahlian yang diperoleh lewat pendidikan belum bisa menjadi kekuatan seperti yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, Presiden Pertama RI, dengan “revolusi harapan-harapan yang meningkat” (*revolution of rising expectations*). Kecerdasan, kemahiran, dan keahlian yang dimiliki oleh rakyat siswa dan mahasiswa—masih di bawah pasungan kehendak pembangunan pemerintah, bukan lahir dari idealisme, inspirasi, dan aspirasi diri sendiri. Orientasi sistem pendidikan yang tidak mengakar pada budaya dan dan

¹⁶ Imam Tholhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan; Mengurai akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 17.

idealisme sendiri akhirnya berimplikasi pada lahirnya penyakit rendah diri (*inferiority complex*) yang pada gilirannya menimbulkan sikap negatif terhadap semua hal.

Problem Kejujuran. Masalah mentalitas/moralitas yang menggerogoti pelaku pendidikan, yaitu masalah budaya tidak jujur dan manipulasi proses atau hasil yang tampaknya juga menjadi penyakit kronis yang susah sembuhnya. Mulai dari praktek “menyontek” di kalangan pelajar yang tidak pernah mati, oknum guru yang melakukan tindakan tidak terpuji “membantu” siswa mengerjakan tes, atau membocorkan soal Ujian Nasional, muncul jasa pembuatan tugas akhir, berupa skripsi atau bahkan tesis yang didalamnya dinyatakan dengan bermaterai “Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi/Tesis hasil karya saya sendiri”, perekrutan tenaga pengajar atau pembelajar yang sarat dengan KKN tanpa melihat portofolio yang bersangkutan atau hasil seleksi atau tes yang dilaksanakan, hingga pada level yang sangat tragis yaitu jual beli gelar.

Kekerasan dan Perilaku amoral. Jika kita menengok lebih dalam lagi, praktek pelaksanaan pendidikan di negara kita masih terkesan amburadul, tidak sistematis, dan sangat jauh dari tujuan dari pendidikan itu sendiri dimana filosofi pendidikan/pembelajaran sebagai usaha untuk mengembangkan potensi diri pembelajar dan penanaman nilai-nilai moral-spiritual, pada akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik dalam tataran praktis. Pendidikan dinilai “gagal” manakala *outcome* dan *outputnya* tidak lagi menelorkan pembelajar yang memiliki *thinking skill* dan *social skill* dengan kepekaan nurani yang berlandaskan moralitas, *sense of humanity*.

Kasus kekerasan dan premanisme di IPDN sebagai lembaga yang didirikan untuk menciptakan aparatu-aparatur pemerintahan yang notabene akan menjadi tauladan dan *uswah* bagi masyarakat sangat memprihatinkan, dimana telah terjadi

pembunuhan 35 praja sejak tahun 1995, merupakan bukti bahwa peoses bahkan produk pendidikan berada pada tingkatan terburuk, jauh sebagaimana diharapkan. Belum lagi kasus amoral dan asusila dikalangan pembelajar, dengan merebaknya VCD porno oleh oknum mahasiswa Iteas Bandung, lalu diikuti oleh yuniornya dikalangan SMP dan SMU menambah daftar panjang praktek asusila peserta didik. Di Jawa Barat, ada beberapa siswa dan siswi SMU Negeri yang berbuat tidak senonoh di dalam kelas dengan masih menggunakan seragam sekolah. Uniknya peristiwa tersebut sempat direkam lewat video dan disebarakan lewat fasilitas internet. Dan mungkin masih banyak kasus serupa terjadi di tempat-tempat lainnya.

Dalam kasus lain seorang anak SMP tega membunuh orang tuanya sendiri, ditempat lain seorang pelajar SD bunuh diri dengan alasan tidak sanggup membayar SPP. Hal ini terjadi karena pendidikan kita gagal dalam menanamkan nilai-nilai moral-spiritual. Kehilangan moralitas menjadi sumbu hilangnya sendi-sendi masyarakat, yang terbentuk hanyalah peradaban yang sekarat, yang entah sampai kapan menemui ajalnya.¹⁷

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN SPATIAL THEORY

Dalam kajian sosiologi pendidikan, *spatial theory* (teori tentang *space*) ini bukanlah hal yang baru. Begitu halnya dalam konteks kajian sosiologi secara umum. *Spatial Theory* secara sederhana bisa dipahami sebagai teori tentang tempat, kondisi dan suasana, atau batas teritori. Susan L. Robertson mengatakan bahwa untuk dapat memahami *spatial theory* dari sisi kebahasaan bisa dianalisa melalui tiga pemikiran filosofis; ontologis dan epistemologis. Berdasarkan pada pandangan ontologis, kata 'space', yang menjadi kata dasar dari *spatial*, bermakna sosial dan nyata

¹⁷ Zaim Elmubarak, *Membumikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 29.

serta space itu diproduksi/diciptakan (*space is social and real; and space is socially produced*). Secara epistemologis, dia mengatakan: "Epistemologically, space can be known through particular categories of ideas, as 'perceived', 'conceived' and 'lived'...¹⁸, or as 'absolute', 'relative' and 'relational'."¹⁹ Artinya, 'space' bisa diketahui dengan kategori tertentu, seperti hal yang dirasa, dipahami, dan hidup atau abasout, relatif, dan rasional. 'Space' merupakan hal yang dinamis, sering berubah, dan selalu ada pergeseran.

Dalam pandangan Kim Knott, *spatial teory* tak ubahnya teori tentang tempat (*theory of place*), atau teori tentang suatu lokasi. Kim Knott mendasarkan pendapatnya pada kelompok fenomenolog, (seperti M. Heidegger, Edward Casey, dan Christopher Tilley). Namun, Kim Knott juga mengakui bahwa pada perkembangan teori ini berubah menjadi lebih dinamis dan memperluas cakupan tempat (*place*) ke arah (*space*).²⁰ Kalervo G Nulson dan Colin Symes cenderung membedakan konsep *space* dan *place*. Dia menyebut :

"The spatial turn tends to emphasize the transient and social nature of space, that space is a construct *not* a given. Here it is usual to contrast space with place, the more nominal sense of space. For example, places generally have names; they figure on maps, have boundaries and parameters—there is

¹⁸ 'perceived space' adalah tindakan (*practice space*) yang berbentuk materi/subjek. 'conceived space' disebut juga space yang representasikan dan dikonseptualisasi. 'lived space' disebut juga *representational space* yakni *space* yang secara fisik atau simbol diasosiasikan terhadap suatu tempat. Lihat Susan L Robertson 'Spatializing' the sociology of education Stand-points, entry-points, vantage-points" dalam M. W. Apple (ed), *The Routledge International Handbook of The Sociology of Education*. (Milton Park, Routledge, 2010), 17

¹⁹ Absolute Space adalah materiality of space.space is relative in the sense that there are multiple geometries from which to choose (or not), and that the spatial frame is dependent upon what is being relativized and by whom. The idea of 'relational space' is intended to capture the notion that there are no such things as time and space outside the processes that define them. (lihat; *Ibid* 18)

²⁰ Kim Knott 'Spatial Theory And Method For Study of Religion'dalam *The Fennish Study for the Study of religion* (Temenos, Volume 41. No 2, 2005), 155

an element of fixity pertaining to them. Place lends itself to more 'objective', scientific accounts of space—even though what constitutes a place is itself a construct, subject to myriad judgements as to where its boundaries and populations begin and end (for debates on space and place see Agnew 2005; Casey 1996; Harvey 1993; Massey 1993b). Space is more generic, more amorphous and porous, hard to pin down. It is more subjective, more quotidian—not the object of parenthesizing and naming in quite the same way place is. The fact that it is usual to refer to spatial practices is also revealing: places do not have practices in quite the same way. Space in this sense is more of a verb than a noun.”²¹

Kutipan ini bermakna bahwa terkadang *space* dan *place* dibedakan. Place biasanya memiliki nama, batasan, dan cenderung objektif (berdasarkan pada objek yang dilihat). Sedangkan '*space*' cenderung generik, tak berbentuk, dan sulit dideteksi. Kosa kata *space* cenderung dimaknai sebagai kata kerja (*in process*), sebaliknya '*place*' dimaknai sebagai kata benda yang tak bergerak.

Penejelasan di atas, menunjukkan bahwa *spatial theory* mengkaji seluruh aspek yang ada pada suatu tempat. 'Space' adalah konsep yang memperbolehkan kita berbicara, menulis, dan berbagi ide tentang aspek pengalaman sosial manusia. Kim Knott membagi lima element 'space'; pertama, *the body* sebagai sumber 'space'. Kedua, dimensi 'space'. Ketiga, properti 'space', keempat aspek-aspek space. Kelima, dinamika space.²² Namun, hal yang perlu

²¹ Kalervo N Galson & Colyn Symes *Spatial Theory Of Education* (New York; Routledge, 2007), 5

²² Kim Knott menggunakan *body as source of space* karena didalamnya terjadi konsesi dan interaksionisme antara satu orang dengan orang yang lain. Personalitas, persepsi, dan hubungan seseorang sangat mempengaruhi segala hal yang menyangkut tentang space. Bahkan, dia mengatakan perbedaan biologis seseorang pada suatu *space* tertentu bisa mendapatkan perlakuan yang berbeda. Dia juga menambahkan perbedaan budaya juga sangat memungkinkan seseorang tidak diterima. Makna elemen kedua dimensi *space*. Pada aspek ini dia ingin menyebutkan bahwa *space* merupakan produksi dari interaksi sosial dan kebudayaan dan memproduksi. Siapapun, yang berasal dari *space* berbeda akan

digarisbawahi adalah, pembagian elemen oleh Kim Knott ini memposisikan *Spatial Theory* sebagai cara memandang dan meneliti agama. Agama oleh Kim Knott memiliki nilai dan norma yang berbeda dengan kehidupan sosial secara umum.

Jika pandangan tentang 'space' diletakkan pada konteks lembaga pendidikan, maka hasilnya pun sama dengan konsepsi awal tentang 'space'. Pendidikan bukanlah barang yang kosong yang tidak memiliki dimensi dan konsepsi. Di dalam pendidikan ada interaksionisme dan nilai yang dibentuk bersama-sama, kemudian, dipraktekkan bersama pula dengan sadar. *Spatial theory* berguna untuk mendeskripsikan apa yang 'mesti' dilakukan dan 'haram' dilakukan dalam pendidikan. Bagaimana cara membangun nilai-nilai kebersamaan berdasarkan teori konstruksionisme sosial. Bill Green mengatakan bahwa : *"Educational space is typically seen therefore as a 'container' within which education simply 'takes (its) place', with varying degrees of effectiveness and efficiency. From classrooms and schools to larger administrative jurisdictions such as 'districts', 'regions', and 'clusters'—all such sites and territories operate as commonsense, convenient registers of educational organization and governance, activity and application."*²³

Jessop (dalam Apple) mengatakan bahwa ada lima terma untuk memahami cara kerja metodik *Spatial Theory*; *territory, place, scale, network, dan personality*. *Territory* yang dimaksud adalah batas-batas berkaitan dengan 'space' pada aspek tertentu. *Territory* merupakan area yang mesti dikelola (*managed*) dan diatur (*governed*).

menjadi 'asing' pada interaksi seseorang ditempat tersebut. *Ketiga*, properti space. Pada konteks ini dia ingin menegaskan bahwa space bukanlah tempat yang kosong (*empty place*) ada banyak atribut sosial atau kultural yang orang lain tidak bisa leluasa dalam bertindak. Ada aturan nilai dan norma yang berlaku dalam space tersebut. *Keempat*, Aspek-aspek space. Ini berkaitan dengan permasalahan apa yang dirasakan, dipahami, dan kehidupan seseorang pada space tersebut. *Kelima*, dinamika space. Dia ingin menekankan *Space* juga bukan barang sakral yang tidak bisa berubah, ada beberapa perubahan-perubahan yang secara simultan terjadi di dalam *space*. (Lihat ; Kim Knott, *Spatial Theory and Method for study of religion 156-166*)

²³ Bill Green and Will Letts Space, equity, and rural education A 'trialectical' account" dalam Kalervo N Gulson & Colyn Symes *Spatial Theory Of Education*, 58

Sebuah *Territory*, semestinya, berisi hal-hal yang normatif. Dalam konteks organisasi, *territory* bisa dianggap sebagai hal yang *absolute* (semisal kompleksitas sikap individu), hal yang perlu dipahami (seperti peta regional), dan hal yang hidup (seperti asal usul seseorang). Adapun makna skala (*scale*) dalam konteks ini adalah representasi kehidupan sosial seseorang yang distrukturisasi dengan cara yang rasional, dari bentuk lokalitas, nasional dan global. Ada beberapa anggapan skala ada hal yang direproduksi dalam wujud material. Artinya, skala merupakan sebuah reorganisasi keadaan, kebiasaan, dan persepsi. Konsep selanjutnya adalah tempat (*place*), dalam kajian *spatial theory*, tempat diidentikkan dengan sebuah lokasi yang khusus, dan memiliki interaksi yang khusus pula. Seperti rumah untuk keluarga, masjid untuk beribadah, dan sekolah untuk belajar. Orang-orang yang berinteraksi disana pun memiliki ciri khas tersendiri. Sedangkan yang dikategorikan *network* (hubungan/jaringan) adalah interkoneksi antar 'space'. Terakhir adalah *positionality* (penempatan). Dalam konteks ini, seseorang harus mengkaji apakah satu tempat dengan yang lain memiliki keterhubungan atau tidak. Dengan demikian, 'space' harus mencari sebuah hirarki.²⁴

Susan L. Robertson membuat kesimpulan kaitan antara pendidikan dan *spatial* teori sebagai berikut:

1. Hubungan sosial merupakan *latent in space* (tersembunyi dibalik space) dan direproduksi melalui sebuah sistem, seperti pendidikan.
2. Space pendidikan adalah suatu produk
3. Space pendidikan juga diproduksi
4. Space pendidikan berbentuk *polymorphic*
5. Space dalam pendidikan cukup dinamis dan berkaitan dengan hubungan sosial.

²⁴M. W. Apple (ed), *The Routledge International Handbook of The Sociology of Education*, 17

6. Space pendidikan dan orang-orang didalamnya merupakan produk interaksi-dialektis²⁵

Tabel : Kerangka Koseptual Space di Sekolah

	Spatial Practice [perceived space]	Representation of space [conceived]	Space of representation [lived]
Absolut e space	Pengetahuan khusus/pelajar an yang disampaikan acak kepada siswa; ruang kelas	Kelompok kelas/kemampuan/ting kat tahun/jenis sekolah; prospek sekolah, seragam sekolah	Aspirasi; perasaan berharga/lessne ss; kepemilikan; ketertarikan; perlawanan dan pemberontakan
Relative space	Perbedaan tingkat ; pendidikan siswa; ekologi sekolah lokal; sekolah campuran (kelas sosial dan latar kultur)	Kemampuan sebagai bawaan dari kecerdasan/kehususan; kelas sebagai refleksi kemampuan;	Setiap sumber selalu menciptakan kompetensi, tak satupun dari kita yang gagal semuanya. Menolak sekolah yang gagal/sukses.
Relation al space	Sekolah sebagai sistem reproduksi setiap saat; performen dalam sistem pendidikan	Re/produksi kesalahan; remitokrasi; sratifikasi sosial.	Memulai kompetensi belajar; pekerjaan kelas, strategi kelas

²⁵Susan L Robertson 'Spatializing' the sociology of educationStand-points, entry-points, vantage-points" 16-23

Tabel 2 : Konsep Space secara Global

	Spatial Practice <i>[perceived space]</i>	Representation of space <i>[conceived]</i>	Space of representation <i>[lived]</i>
Absolute space	Respon pada simpul-simpul outward dan upward baru; sektor baru	Rencana pengembangan lokal; rencana kemitraan; sub-kontrak/aoutsourcing; rencana pengembangan sekolah; visi lokal; pemasaran	Kegelisahan melebihi kesempatan memilih; menguatkan respon organisasi tanpa kekuatan untuk mempengaruhi perubahan kepentingan; pengawasan; performatifitas
Relative space	Perbedaan geometris hubungan pemerintah yang menghambat skala; <i>rescalling</i>	Pengembangan lokal, sosial kapital, komunitas keahlian, kemitraan; sektor ketiga (network)	Perbedaan pilihan; perbedaan rezim inspeksi; perbedaan keterlibatan rasa oleh komunitas luas
Relational space	Susunan dioperasikan dalam berbagai simpul; daya saing	Wacana global pemilihan, pemasaran, manajemen diri, interpreneuralisme, proyek politik neo-liberal.	Gairah konsumen; enterpreneur; flexibel; kegelisahan respon untuk kemajuan.

Pemaparan konsep di atas, dapat disimpulkan, bahwa *spatial theory*, secara aplikatif di dalamnya dunia pendidikan, bersinggungan erat dengan semua orang yang ada di dalam, normatiftas lingkungan sekolah, konstruksionisme sosial dalam arti yang luas, serta penanaman nilai-nilai yang diproduksi dan mampu memproduksi perilaku orang lain. *Spatial Theory*, sebagai alata bedah ilmu pengetahuan, juga bersinggungan erat dengan disiplin-disiplin keilmuan lainnya, termasuk antropologi manusia. Suatu pandangan yang mendasarkan kehidupan dan interaksionisme manusia.

KONSTRUKSIONISME BUDAYA SEKOLAH²⁶; *A Spatial Theory Implication*

Berikut adalah beberapa pertanyaan mendasar yang dihasilkan teori tentang 'space of education' ini; Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang merefleksikan 'space of education'; *Who is taught what, how, by whom, where, when; what (school/university classroom) circumstances and what conditions; and with what results? How, by whom, and at what scale are these things problematized, determined, coordinated, governed, administered and managed? In whose*

²⁶ Konstruksionisme dari segi kebahasaan berasal dari dua bahasa *pertama* adalah konstruksi yang berarti pembuatan dan penyusunan. *Kedua* imbuhan *-isme* yang bermakna faham atau aliran pemikiran. Namun, kajian sosiologi, konstruksionisme adalah teori yang berangkat dari *premis* bahwa manusia mengkonstruksi (membentuk atau menyusun) realitas sosial meskipun melalui proses subjektif namun dapat berubah menjadi objektif. Dalam proses konstruksi tindakan atau perilaku manusia ada tiga terminologi yang dikenal; *pertama*, eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau pengekspresian diri terhadap dunia nyata. Dalam bahasa yang lebih sederhana, eksternalisasi adalah wujud pengaplikasian ide manusia menjadi tindakan nyata. *Kedua*, objektivasi yaitu wujud produk dari hasil eksternalisasi. Misalnya adalah bahasa. Bagi, seorang pengikut paham konstruksionis, bahasa merupakan wujud dari eksternalisasi diri dari dunia ide. *Ketiga*, internalisasi yakni proses pereduksian kembali dunia objektif ke dalam diri subjektif. Lihat Ian Craib, *Teori Teori Sosial Modern*; dari Parson Sampai Habermas (Jakarta; Rajawali Press 1992), 126-127. Lihat juga Mike O'Donnell, "The Social Construction Of Youthful Masculinities" dalam Stephen Ball *The Routledge Falmer Reader of Sociology of Education* (New York; Routledge Falmer, 2004), 90

*interests are these practices and politics carried out? What is the scope of 'education', and what are its relations with other sectors of the state, other scalar units and national society? What are the individual, private, public, collective and community outcomes of education?*²⁷ Pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan bagaimana teori ini bisa diimplementasikan dalam konteks manajemen budaya sekolah (*school-culture management*).

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, budaya sekolah adalah identitas dan produk interaksionis di dalam lembaga pendidikan Islam. Budaya sekolah berasal dari nilai-nilai normatif yang dibuat oleh lembaga, atau nilai historis dari pendiri dan pemimpin lembaga pendidikan tersebut. Namun, terkadang, pendefinisian budaya sekolah dispesifikasikan pada aspek-aspek bentukan pada teritori lingkungan atau iklim lembaga saja. Padahal, jika dipandang menggunakan *spatial theory* bukan hanya 'place' yang bisa memproduksi kebudayaan. Ada pertimbangan-pertimbangan lainnya yang perlu diimplementasikan. Misalnya, *territory*, skala dan *positionality* (penempatan aspek-aspek kebudayaan), dan hubungan dengan tempat yang lain.

Konsepsi budaya sekolah, menurut penulis, seringkali disempitkan pada kajian penciptaan iklim sekolah yang efektif (*climate 'lived in School'*) yakni dengan cara membuat regulasi, memberikan apresiasi, dan penegakan kedisiplin. Jika dilihat dari perspektif yang demikian, maka budaya sekolah merupakan artifisialisasi nilai, dan tidak membekas dan membentuk kepribadian peserta didik. Tidak banyak sekolah yang mencari tahu latar belakang, perbedaan karakter individu, dan pengaruh lainnya yang berasal dari tempat berbeda (*cross-place and territory*). Sekolah seraya bertanggung jawab pada 'space' tertentu, selebihnya, adalah tanggung jawab orang lain.

²⁷ Lihat, Susan L. Robertson 'Spatializing' the sociology of education Stand-points, entry-points, vantage-points" 16-23

Dengan demikian, budaya sekolah semestinya dimaknai sebagai kata kerja (*in processing*) bukan kata benda yang statis. Cara pengimplementasiannya pun mesti dibedakan dengan konsepsi budaya organisasi secara umum. Pasalnya, fitur budaya organisasi dan sekolah terdapat dimarkasi 'space' yang berbeda. Orientasi budaya organisasi berasal dari 'kepentingan yang sama' yakni bisnis dan prestasi (*achievement*). Sedangkan, *production of space* lembaga pendidikan adalah moralitas dan sustainsibilitas tindakan manusia. Untuk lebih mengkongkritkan apa yang penulis maksud, berikut penulis berikat contoh tiga tempat dengan space kebudayaan tertentu; *homeschooling*, *School*, *Bourding House* (Asrama-atau Pondok Pesantren).

Para sosiolog pendidikan beranggapan bahwa 'homeschooling' adalah wujud social movement atas ketidakpercayaan pada lembaga pendidikan (*schooling*), dan adapula yang beranggapan bahwa ini merupakan kebijakan terselubung pemerintah untuk membentuk sebuah subculture pendidikan yang baru. Di sisi lain, homeschooling adalah bentuk privatisasi individu dan privatisasi *territoty of space* lembaga pendidikan. Aturan dan relasi social di rumah lebih mudah dipantau, dengan waktu yang ditentukan sendiri, dan tujuan pendidikan sendiri. Dengan kata lain, *homeschooling* mencipta space pendidikan sendiri dan model pendidikannya memproduksi diri sendiri.

Konteks berbeda di lembaga pendidikan – non asrama (*college atau pesantren*). Produksi space pendidikannya sangat temporal, teritory yang terbatas, interaksionisme sosial yang bercampur aduk antara masyarakat sekolah dan umum, serta relasi sosial yang seakan-akan berwujud *patron-klien* dan *producer-costumer service*. Maka tidak mengherankan jika lembaga pendidikan 'space' yang mereka ciptakan dianggap memiliki pengaruh kecil terhadap karakter anak. Meskipun, semua sekolah menganut satu nilai kebudayaan, tapi kebudayaan lain masih bisa berkembang tanpa

kendali. Sekolah memiliki kelemahan *'time and place'* untuk memproduksi output pendidikan. Dari sisi *'networking'* – dalam konteks *spatial theory*, keberadaan sekolah memiliki kesamaan karakteristik. Mereka menerima semua orang tanpa proses identifikasi diferensial karakter masing-masing individu. Berkaitan budaya organisasi yang ada, sekolah seringkali hanya menginformasikan ilmu tanpa proses pendampingan dan pembimbingan keilmuan hingga ke ranah praktis.

Terakhir, dan inilah yang menurut penulis, merupakan contoh pemberlakuan budaya pendidikan dan *spatial theory as process*; pondok pesantren di dalam sistem pendidikan Islam atau asrama (*college/ boarding house*) di Barat. Khusus konteks pesantren, kita bisa mengetahui bagaimana mereka mengkonstruksi kepribadian seseorang, membudayakan nilai, mengkonstruksi perilaku, mengobjektivasi gagasan keilmuan, membatasi ruang-waktu-tempat, serta menginternalisasi nilai-nilai baru. Relasi sosial di pesantren pun berbeda dengan masyarakat di luar. Identitas 'santri' melekat abadi tanpa mengenal waktu dan tempat. Kesederhanaan adalah cerminan perilaku. Keakraban dan gotong royong adalah *processing point* yang dibentuk. Pondok pesantren membentuk, mencipta proses sendiri, dan sulit dipengaruhi oleh kebudayaan luar. Pembudayaan lingkungan di pondok pesantren, bahkan seringkali dikonotasikan sebagai proses indoktrinasi, *brainwashing*, *reprogramming of mind*, *beliefs of mind*, dan fanatik.²⁸ Meskipun, karakteristik ini tidak terjadi di seluruh pondok pesantren.

Setidaknya inilah yang ingin penulis sampaikan; bahwa pendidikan dalam pengelolaan budaya sekolah dan *spatial theory* bisa dijalankan secara mutual. Budaya sekolah/organisasi bisa dijadikan sebagai basis identifikasi membaca karakteristik

²⁸Charlene Tan, *Islamic Education and Indoctrination: The Case In Indonesia* (New York; Routledge, 2011) dan Martin Van Bruisenn, "Tradisional and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia" dalam Fastish A Noor ed. *Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008). 217-218.

seseorang atau lembaga pendidikan. Sedangkan *spatial theory* digunakan sebagai alat metodis untuk menciptakan dan melanggengkan budaya organisasi. Element-elemen penting dalam *spatial-theory* seperti budaya yang diterima, dipahami, dan hidup, merupakan elemen penting dalam membentuk perilaku seragam masyarakat sekolah atau anggota lembaga pendidikan. Selain itu, sekolah – sebagaimana diungkapkan *Spatial Theory* – semestinya memiliki property dan dimensi yang berbeda dengan kebudayaan lain di luar sekolah. Sekolah harus berfungsi sebagai pencipta kebudayaan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leadership*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Buchori Alma dkk, *Manajemen Corporate dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Fokus Pada Mutu dan Layanan Prima*, Bandung; Alfabeta, 2009.
- Charlene Tan, *Islamic Education and Indoctrination; The Case In Indonesia*, New York; Routledge, 2011
- Dalam Cary L. Cooper at.al, *Orgasnization Culture and Climate*, England: Wiley, 2001.
- Ian Craib, *Teori-Teori Sosial Modern; dari Parson Sampai Habermas*, Jakarta; Rajawali Press 1992.
- Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan; Mengurai akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kalervo N Gulson & Colyn Symes *Spatial Theory Of Education*, New York; Routledge, 2007.
- Kim Knott 'Spatial Theory And Method For Study of Religion'dalam *The Fennish Study for the Study of religion*, Temenos, Volume 41. No 2, 2005.

- Fasrish A Noor *edit. Madrasa in Asia; Political Activism and Transnational Linkages* (Amsterdam; Amsterdam University Press, 2008.
- Stephen Ball *The Routledge Falmer Reader of Sociology of Education* (New York; Routledge Falmer, 2004.
- Rhenald Kasali, *Change*, Bandung; Rajawali Press, 2006.
- Sebagaimana dijelaskan oleh Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana, 2012.
- William Mulford at.al, *Educational Leadership for Organisational Learning and Improved Student Outcomes* (New York: Kluwer Academic Publishers, 2004.
- M. W. Apple (ed), *The Routledge International Handbook of The Sociology of Education*. (Militton Parka, Routledge, 2010.
- Talizuhu Ndraha, *Budaya Organisasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997, 33
- Tim Scott, at.all. *Healthcare Performance and Organisational Culture*, UK: Radecliffe Press, 1992.
- Wirawan, *Budaya dan Iklim Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Zaim Elmubarok, *Membumikan Pendidikan Nilai*, Bandung: Alfabeta, 2008.